

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kecurangan bukan lagi hal yang jarang ditemui di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, banyak kasus kecurangan yang terungkap satu-persatu. PSA 70 (SA 316) membedakan dua jenis salah saji menjadi kesalahan (*errors*) dan kecurangan (*fraud.*). Suatu *kesalahan* merupakan salah saji laporan keuangan yang *tidak disengaja* Sedangkan *kecurangan* merupakan salah saji laporan keuangan yang *disengaja*.<sup>1</sup> Itu berarti perbedaannya terletak pada niat pembuat laporan keuangan tersebut. Definisi kecurangan sangatlah luas. Segala bentuk kecurangan merupakan tindakan yang melawan hukum. Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan beberapa pasal yang mencakup pengertian kecurangan seperti Pasal 362 tentang pencurian, pasal 368 tentang pemerasan dan pengancaman, pasal 372 tentang penggelapan, pasal 378 tentang perbuatan curang, pasal 396 tentang merugikan pemberi piutang dalam keadaan pailit, dan pasal 406 tentang menghancurkan atau merusakkan barang. Di samping KUHP kecurangan juga diatur dalam undang-undang tindak

---

<sup>1</sup> Randal J. Elder dkk., *Jasa Audit dan Assurance Pendekatan Terpadu*, (Jakarta:Salemba Empat, 2011), p. 106,

pindana korupsi, undang-undang tentang pencucian uang, undang-undang perlindungan konsumen, dan lain-lain.<sup>2</sup>

Dalam bukunya, Tuannakota mengungkapkan ada tiga bentuk kecurangan. Pertama adalah penyalahgunaan atas aset. Kecurangan tersebut melibatkan pencurian aktiva entitas. Contohnya kasus yang terjadi pada awal tahun 2011. Maret 2011, terungkap kasus kecurangan yang dilakukan oleh Malinda Dee salah seorang *Relationship Manager* Citibank. Modus yang dilakukan adalah dengan meminta teller Citibank bernama Dwi membantu melakukan pencatatan palsu beberapa transfer uang dari rekening nasabah ke rekening beberapa perusahaan milik Malinda di dalam dan di luar Citibank. Sejak tahun 2009, Malinda diduga sudah merugikan Citibank hingga 17 miliar rupiah.<sup>3</sup> Kasus tersebut merupakan bentuk nyata dari kecurangan penyalahgunaan aset khususnya pencurian aset. Malinda memindahkan uang dari rekening nasabah tanpa sepengetahuan nasabah sehingga dapat dikategorikan dalam pencurian aset. Bank Indonesia mengakui banyaknya kasus kecurangan atau pembobolan bank disebabkan karena lemahnya pengawasan internal.<sup>4</sup> Hal tersebut yang terjadi dalam kasus Citibank. Pengendalian internal yang kurang baik menyebabkan modus sederhana yang dilakukan Malinda Dee tidak dapat terdeteksi selama bertahun-tahun.

---

<sup>2</sup> Theodorus M. Tuanakotta, *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*, (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2007), p. 95-96

<sup>3</sup> <http://www.bamsoetnews.com/berita/berita9063-Kronologis-Kasus-Malinda-Dee.html> (diakses pada Sabtu 6 Maret 2016 pukul 10:10 WIB)

<sup>4</sup> <http://finance.detik.com/read/2011/06/22/111639/1665825/5/bi-akui-banyak-bank-dibobol-karena-pengawasan-internal-membre> (diakses 6 Maret 2016 pukul 10:15 WIB)

Kedua adalah pernyataan palsu atas laporan keuangan salah saji atau pengabaian jumlah atau pengungkapan yang disengaja dengan maksud menipu para pemakai laporan keuangan itu. Untuk mempertahankan kinerjanya, PT Toshiba yang sudah berusia 140 tahun melakukan kecurangan dengan memanipulasi laporan keuangan. Toshiba menggelembungkan laba sebesar 151,8 miliar Yen atau sebesar 1,22 miliar AS Dollar.<sup>5</sup> Penggelembungan dana tersebut merupakan upaya untuk menarik perhatian investor dalam berinvestasi. Namun sayangnya, kecurangan tersebut malah mencoreng nama baik Toshiba.

Manipulasi laporan keuangan seringkali dilakukan dalam rangka mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan atau menarik investor. Seperti PT Toshiba, beberapa perusahaan juga ditemukan menaikkan laba untuk menarik investor. Selain itu juga ditemui beberapa perusahaan yang menurunkan laba guna menurunkan beban pajak. Misalnya kasus yang terjadi pada PT. Indosat. PT Indosat diduga telah menggelapkan pajak dengan memanipulasi SPT Tahunannya.<sup>6</sup> Manipulasi laporan keuangan bukan kecurangan yang hanya dapat dilakukan oleh individu, melainkan kecurangan yang dapat dilakukan secara korporat. Kecurangan ini bisa melibatkan manajemen perusahaan itu sendiri. Terdapat asimetri informasi atau ketidaksesuaian informasi yang diberikan perusahaan dengan keadaan perusahaan sebenarnya.

---

<sup>5</sup><http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/15/07/23/nrx7kl-skandal-akuntansi-toshiba-dan-tantangan-bisnis-lembara-syariah-1> (diakses pada Sabtu, 5 Maret 2016 pukul 14:20 WIB)

<sup>6</sup><https://bisnis.tempo.co/read/news/2003/11/04/05627427/ditjen-pajak-akan-usut-dugaan-penggelapan-pajak-im3> (diakses pada Minggu, 6 Maret 2016 pukul 10:12 WIB)

Ketiga adalah korupsi penyalahgunaan jabatan di sektor pemerintahan untuk keuntungan pribadi. Pegawai Negeri Sipil bekerja dalam birokrasi pemerintahan, salah satu tugasnya adalah melayani dan memberdayakan masyarakat. Namun, peran PNS ini belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal tersebut terjadi karena lemahnya budaya organisasi pada organisasi pemerintah, antara lain penyalahgunaan wewenang, rendahnya kualitas pelayanan yang mengakibatkan rendahnya produktivitas, serta maraknya kasus korupsi di tubuh pemerintah.

Kecurangan dalam bentuk korupsi sangat mudah ditemui di dalam jajaran pemerintahan Indonesia baik dari pemeritahan daerah sampai pemerintahan pusat. Pada Maret 2015, terungkap kasus korupsi pengadaan *uninterruptible power supply (UPS)* sekolah-sekolah di DKI Jakarta yang dilakukan oleh beberapa anggota DPRD DKI Jakarta. Pengadaan UPS tersebut menghabiskan anggaran sebesar Rp 330.000.000.000 dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan DKI 2014.<sup>7</sup> Sayangnya, anggaran tersebut tidak sepenuhnya tepat sasaran. Ditambah lagi, laporan keuangan propinsi DKI Jakarta mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) selama 3 tahun berturut-turut dari tahun 2013 sampai tahun 2015. <sup>8</sup>Pengecualian atas kewajaran laporan keuangan disebabkan permasalahan tahun 2013 belum tuntas ditindaklanjuti dan ada permasalahan lain pada tahun 2014 diantaranya (i) pengendalian dan

---

<sup>7</sup><http://suarajakarta.co/news/politik/ini-janji-ahok-naikkan-gaji-pns-dki%E2%80%8F/> (diakses pada 11 Maret 2016 pukul 14:32 WIB)

<sup>8</sup><http://megapolitan.kompas.com/read/2016/06/01/17334891/untuk.ketiga.kalinya.laporan.keuangan.dki.jakarta.dapat.opini.wdp.dari.bpk> (diakses 23 juni 2016 pukul 10.20 wib)

pengamanan Aset Lainnya senilai Rp3,5 triliun serta pencatatannya; (ii) Permasalahan piutang pajak bumi dan bangunan serta piutang pajak kendaraan bermotor yang tidak dapat ditelusuri rinciannya dan (iii) kelemahan sistem pengendalian belanja modal atas 85 paket pekerjaan pengadaan barang.<sup>9</sup>

Hal tersebut menjadi alasan Basuki Tjahja Purnama, Gubernur DKI Jakarta, mengambil kebijakan untuk menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil DKI Jakarta. Seperti yang diungkapkan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara (Persero), Ismed Hasan Putro menilai korupsi terjadi karena dua hal, gaji kecil atau oknum tersebut rakus.<sup>10</sup>Gaji yang tidak seimbang dengan kebutuhan ditambah dengan peluang untuk melakukan kecurangan akan mendorong orang untuk melakukan kecurangan.

Kecurangan seringkali dikaitkan dengan tiga faktor, yaitu tekanan, peluang dan rasionalisasi. Tekanan dapat berasal dari berbagai macam aspek. Misalnya ekonomi dan gaya hidup. Kebutuhan ekonomi yang mendesak seringkali dijadikan alasan seseorang melakukan kecurangan. Kompensasi yang tidak sebanding dengan kebutuhan dapat menjadi faktor yang mendorong seseorang melakukan kecurangan. Namun tidak jarang seseorang melakukan kecurangan hanya untuk memenuhi gaya hidup yang tidak sesuai atau lebih tinggi dari pendapatan yang sebenarnya. Seperti kasus Malinda Dee misalnya. Motif Malinda Dee melakukan pencurian

---

<sup>9</sup> <http://www.bpk.go.id/news/pemeriksaan-atas-lk-provinsi-dki-telah-sesuai-standar> (Diakses 23 Juni 2016 PKL 10.15)

<sup>10</sup> <http://www.tribunnews.com/nasional/2014/03/23/dirut-rni-pns-korupsi-karena-gajinya-kecil> (diakses pada Sabtu, 5 Maret 2016 pukul 14:49 WIB)

dana nasabah bukanlah didasari oleh kebutuhan ekonomi melainkan karena gaya hidup.

Selain terdapat tekanan, kecurangan juga dapat disebabkan oleh peluang. Kesempatan yang tercipta ditambah dengan pengendalian internal yang kurang baik semakin menambah resiko kecurangan. Seseorang yang awalnya tidak memiliki niat melakukan kecurangan bisa saja melakukan kecurangan saat ada peluang. Peluang berkaitan erat dengan lemahnya pengendalian internal. Pengendalian internal yang buruk semakin memperbesar peluang karyawan melakukan kecurangan. Kembali lagi pada kasus Malinda Dee yang kecurangannya baru terdeteksi setelah dilakukan lebih dari satu tahun. Jika pengendalian internal baik, tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mendeteksi kecurangan. Bahkan pengendalian internal yang baik dapat mencegah kecurangan yang dilakukan oleh karyawan.

Rasionalisasi merupakan salah satu faktor pendukung kecurangan yaitu mencari kebenaran atas kecurangan yang telah dilakukan. Pelaku seringkali tidak menyadari bahwa telah melakukan kecurangan. Hal ini dapat disebabkan oleh pribadi pelaku yang tidak peka terhadap peraturan maupun budaya organisasi yang sudah terbiasa dengan kecurangan. Misalnya seperti kasus sogok-menyogok yang sudah menjadi budaya di Indonesia. Berawal dari dunia pendidikan yang sudah dimulai dengan budaya sogok menyogok. Untuk masuk ke sekolah yang dikenal favorit, tidak jarang orangtua murid berani mengeluarkan uang lebih sebagai

sogokkan. Tingkat keparahan budaya sogok-menyogok ini sudah semakin gawat di Indonesia. Pelaku sogok-menyogok ini tidak lagi merasa bersalah atau malu. Bahkan lingkungan ikut memaklumi tindakan-tindakan seperti ini. Hal inipun berlanjut pada dunia kerja. Baik pada institusi pemerintahan maupun swasta. Pejabat pemerintah seringkali tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat kasus sogok-menyogok. Bukan hanya pekerja kantoran, para pemilik angkutan umum juga ikut dalam budaya sogok-menyogok ini dalam pengujian kendaraan bermotor atau yang biasa dikenal dengan KIR. Pemilik angkutan umum bersedia mengeluarkan uang lebih untuk menyogok petugas agar meloloskan ujian sekalipun kendaraan tidak layak digunakan.

Kecurangan yang terjadi di Indonesia begitu kompleks dan semakin berkembang. Dapat disimpulkan bahwa kecurangan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh lemahnya pengendalian internal, asimetri informasi, budaya organisasi, kesesuaian kompensasi, dan manajemen laba perusahaan.

Dari seluruh faktor-faktor yang menyebabkan kecurangan akuntansi, peneliti tertarik untuk meneliti salah satu faktor yaitu kesesuaian kompensasi dan pengaruhnya terhadap kecurangan akuntansi.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang berikut, maka dapat dikemukakan bahwa kecenderungan kecurangan akuntansi dipengaruhi oleh hal-hal berikut:

- 1) Pengendalian Internal yang longgar
- 2) Asimetri informasi antara pembuat laporan keuangan dan penerima informasi
- 3) Budaya melakukan kecurangan dalam organisasi
- 4) Kompensasi yang tidak sesuai
- 5) Manajemen laba yang tidak sesuai fakta

## **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, ternyata banyak faktor-faktor yang menyebabkan kecenderungan kecurangan akuntansi. Karena luasnya permasalahan serta keterbatasan peneliti, maka penelitian hanya membatasi pada masalah “Pengaruh Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi”. Indikator untuk mengukur kesesuaian kompensasi adalah adanya keadilan yang dirasakan karyawan terhadap kompensasi yang diberikan perusahaan, kompensasi yang diberikan sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar, serta kompensasi sebagai imbalan yang diterima sudah sesuai dengan kinerja karyawan. Sedangkan indikator untuk mengukur kecenderungan kecurangan akuntansi Manajemen atau karyawan lain memiliki kepentingan atau berada di bawah tekanan atau mempunyai masalah keuangan yang tidak



dapat diceritakan kepada orang lain yang menjadikan alasan untuk melakukan kecurangan, ada peluang yang tercipta untuk melakukan kecurangan, dan diri sendiri dan lingkungan membenarkan kecurangan.

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka masalah dapat dirumuskan sebagai berikut “Apakah kesesuaian kompensasi mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi?”.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Teoretis**

Hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan dan pemahaman mengenai kecurangan (*Fraud*) dan faktor yang memengaruhi kecurangan tersebut.

##### **2. Kegunaan Praktis**

- 1) Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian yang terkait kecurangan akuntansi.
- 2) Bagi Perusahaan/instansi tempat penelitian, hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan acuan untuk mengurangi kecurangan akuntansi.
- 3) Hasil penelitian ini sebagai sumbangan koleksi berupa bahan pustaka dan bacaan bagi mahasiswa pendidikan akuntansi khususnya dan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta pada umumnya.